

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Inflasi

##### 1. Pengertian Inflasi

Inflasi merupakan salah satu masalah dalam perekonomian yang selalu dihadapi setiap negara. Namun buruknya masalah inflasi ini akan berbeda dari satu waktu ke waktu lainnya. Tingkat inflasi biasanya digunakan sebagai ukuran untuk menunjukkan sampai dimana buruknya permasalahan ekonomi yang dihadapi suatu negara. Oleh karena itu, inflasi dianggap sebagai fenomena moneter karena menyebabkan terjadinya penurunan nilai unit uang terhadap suatu komoditas. Secara umum, penyebab terjadinya inflasi, *natural inflation*, seperti naiknya daya beli masyarakat secara real ekspor meningkat, sedangkan impor menurun, ataupun turunnya tingkat produksi.<sup>1</sup>

Nopirin mendefinisikan inflasi sebagai kenaikan harga-harga umum barang-barang secara terus-menerus. Ini tidak berarti bahwa harga-harga berbagai macam barang itu naik dengan persentase yang sama. Mungkin dapat terjadi kenaikan tersebut tidaklah bersamaan. Yang penting terdapat kenaikan harga umum barang secara terus menerus selama satu periode tertentu.<sup>2</sup>

Inflasi juga disebut sebagai kenaikan harga secara umum, atau inflasi dapat juga dikatakan sebagai penurunan daya beli uang. Makin tinggi kenaikan harga makin

---

<sup>1</sup> Vinna Sri Yuniarti, *Ekonomi Makro Syariah*, (Bandung, CV PUSTAKA SETIA 2016), 127.

<sup>2</sup> Nopirin, *Ekonomi Moneter*, (Yogyakarta, BPFE 1985), 26.

semakin turun nilai uang. Definisi di atas memberikan makna bahwa, kenaikan harga barang tertentu atau kenaikan harga karena panen yang gagal misalnya, tidak termasuk inflasi. Ukuran inflasi yang paling banyak adalah menggunakan *Consumer price index* atau *Cost of living index*. Index ini berdasarkan pada harga dari satu paket barang yang dipilih dan mewakili pola pengeluaran konsumen.<sup>3</sup>

## 2. Dasar Hukum Inflasi

### a. Dasar Hukum Inflasi Berdasarkan Al-Quran

رُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ  
وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ

Artinya: Dijadikan indah pada ( pandangan ) manusia kecintaan kepada yang diinginkan, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga). ( QS Al-Imran: 14).<sup>4</sup>

## 3. Teori Inflasi

### a. Teori Inflasi Konvensional

Secara umum inflasi berarti kenaikan tingkat harga secara umum dari barang komoditas dan jasa selama satu periode waktu tertentu. Inflasi dapat dianggap sebagai fenomena moneter karena terjadinya penurunan nilai unit perhitungan moneter terhadap suatu komoditas. Definisi inflasi oleh para ekonom modern adalah kenaikan

---

<sup>3</sup> Akbar Faoriko, *Pengaruh Inflasi, Suku Bunga, dan Nilai Tukar Rupiah terhadap Return Saham di Bursa Efek Indonesia*, (Skripsi, Pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta 23), 5.

<sup>4</sup> M. Quraish Shihab, *Al-Qur'an dan Maknanya*, (Tangerang: Lentera Hati 2013), 51.

yang menyeluruh dari jumlah uang yang harus dibayarkan (nilai unit penghitungan moneter) terhadap barang-barang/komoditas dan jasa.

#### b. Teori Inflasi Islam

Menurut para ekonomi Islam, inflasi berakibat sangat baik bagi perekonomian karena;

- 1) Menimbulkan gangguan terhadap fungsi uang, terutama terhadap fungsi tabungan (nilai simpan), fungsi dari pembayaran di muka dan fungsi dari unit perhitungan.
- 2) Melemahkan semangat menabung dan sikap terhadap menabung dari masyarakat (turunnya *Marginal Propensity to Save*).
- 3) Meningkatkan kecenderungan untuk berbelanja terutama untuk non-primer dan barang-barang mewah (naiknya *Marginal Propensity to Consume*)
- 4) Mengarahkan investasi pada hal-hal yang non-produktif yaitu menumpukan kekayaan (*Hoarding*) seperti: tanah, bangunan, logam mulia, mata uang asing dengan mengorbankan investasi ke arah produktif: pertanian, industrial, perdagangan, transportasi dan lainnya.<sup>5</sup>

#### 4. Jenis-jenis inflasi

Laju inflasi dapat berbeda antara satu negara dengan negara lain atau dalam satu negara untuk waktu yang berbeda. Atas dasar besarnya laju inflasi, inflasi dapat dibagi ke dalam tiga kategori, yakni; merayap (*creeping inflation*), inflasi menengah (*galloping inflation*), serta inflasi tinggi (*hyper inflation*).<sup>6</sup>

Menurut Nopirin, beberapa jenis inflasi, yaitu sebagai berikut:<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Adriwarman A. Karim, *Ekonomi Makro Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2008), 137-139.

<sup>6</sup> Nopirin, *Ekonomi Moneter...*, 27.

<sup>7</sup> Vina Sri Yuniarti, *Ekonomi Makro Syariah*, (Bandung, CV Pustaka Setia 2016), 132.

a. Jenis Inflasi Menurut Sifatnya

- 1) Inflasi merayap (*creeping inflation*), ditandai dengan laju inflasi yang rendah (kurang dari 10%). Kenaikan harga berjalan secara lambat dengan persentase yang kecil dan dalam jangka waktu yang relatif lama.
- 2) Inflasi menengah (*galloping inflation*), ditandai dengan kenaikan harga yang cukup besar, (biasanya *double digit* atau *triple digit* dan kadang-kadang berjalan dalam waktu yang relatif pendek serta mempunyai sifat akselerasi).
- 3) Inflasi tinggi (*hiper inflation*), inflasi yang paling parah akibatnya harga-harga naik sampai lima atau enam kali. Masyarakat tidak lagi berkeinginan untuk menyimpan uang. Nilai uang merosot dengan tajam sehingga ingin ditukarkan dengan barang.<sup>8</sup>

b. Jenis inflasi menurut sebab terjadinya

Menurut Sukirno, bahwa berdasarkan pada sumber atau penyebab atas kenaikan harga-harga yang berlaku. Inflasi dibedakan kepada tiga bentuk yaitu:

1) Inflasi tarikan permintaan (*Demand Pull Inflation*)

Yaitu inflasi yang terjadi karena terjadinya kenaikan permintaan atas suatu komoditas. Inflasi ini biasanya terjadi pada masa perekonomian yang berkembang pesat. Kesempatan kerja yang tinggi menciptakan tingkat pendapatan yang tinggi dan selanjutnya menimbulkan pengeluaran yang melebihi kemampuan ekonomi mengeluarkan barang dan jasa.

2) Inflasi desakan biaya (*Cost push inflation*)

Yaitu inflasi yang terjadi karena adanya kenaikan biaya produksi. Pada saat krisis moneter ekonomi 1997, ketika banyak industri di Indonesia bahan

---

<sup>8</sup> Vina Sri Yuniarti, *Ekonomi Makro Syariah...*, 133.

bakunya terlalu bergantung pada bahan baku impor sehingga terjadi penurunan nilai mata uang rupiah maka akan berpengaruh terhadap kenaikan biaya produksi.

### 3) Inflasi diimpor (*imported inflation*)

Yaitu inflasi yang disebabkan oleh terjadinya inflasi di luar negeri. Inflasi ini terjadi apabila barang-barang impor yang mengalami kenaikan harga memiliki peranan penting dalam kegiatan pengeluaran perusahaan-perusahaan.<sup>9</sup>

## 5. Indikator Inflasi

Ada beberapa indikator ekonomi makro yang digunakan untuk mengetahui laju inflasi selama satu periode tertentu. Tiga diantaranya akan dibahas dalam uraian berikut ini:<sup>10</sup>

### a. Indeks Harga Konsumen (*Consumer Price Index*)

Indeks Harga Konsumen (IHK) adalah angka indeks yang menunjukkan tingkat harga barang dan jasa yang harus dibeli konsumen dalam satu periode tertentu. Angka IHK diperoleh dengan menghitung harga-harga barang jasa utama yang dikonsumsi masyarakat dalam satu periode tertentu. Masing-masing harga barang dan jasa tersebut diberi bobot (*Weighted*) berdasarkan tingkat keutamaannya. Barang dan jasa yang dianggap paling penting diberi bobot yang paling besar. Di Indonesia, perhitungan IHK dilakukan dengan mempertimbangkan sekitar beberapa ratus komoditas pokok. Untuk lebih mencerminkan keadaan yang sebenarnya, perhitungan IHK dilakukan dengan

---

<sup>9</sup> Nur Rianto Al Arif, *Teori Makro Ekonomi Islam*, (Bandung, Alfabeta 2010), 89-90.

<sup>10</sup> Prathama Rahardja, Mandala Manurung, *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro dan Mikro Ekonomi* (Jakarta: LPFE UI 2008), 367-369.

melihat perkembangan regional, yaitu dengan mempertimbangkan tingkat inflasi kota-kota besar, terutama ibukota propinsi-propinsi di Indonesia. Penentuan barang dan jasa dalam keranjang IHK dilakukan atas dasar Survei Biaya Hidup (SBH) yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Kemudian, BPS akan memonitor perkembangan harga dari barang dan jasa tersebut secara bulanan di beberapa kota, di pasar tradisional dan modern terhadap beberapa jenis barang/jasa di setiap kota.<sup>11</sup>

Inflasi yang diukur dengan IHK di Indonesia dikelompokkan ke dalam 7 kelompok pengeluaran (berdasarkan *the Classification of individual consumption by purpose* - COICOP), yaitu :

- 1) Kelompok Bahan Makanan
  - 2) Kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau
  - 3) Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan Bakar
  - 4) Kelompok Sandang
  - 5) Kelompok Kesehatan
  - 6) Kelompok Pendidikan, Rekreasi, dan Olahraga
  - 7) Kelompok Transpor, Komunikasi, dan Jasa Keuangan.<sup>12</sup>
- b. Indeks Harga Perdagangan Besar (*Wholesale Price Index*)

Jika IHK melihat inflasi dari sisi konsumen, maka Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) melihat inflasi dari sisi produsen. Oleh karena itu, IHPB sering juga disebut sebagai Indeks Harga Produsen (*Prodeser Price Index*).

---

<sup>11</sup> “Pengenalan Inflasi” <http://www.bi.go.id/>, diakses pada 03 Nov. 2018, pukul 13.01 WIB.

<sup>12</sup> “Pengenalan Inflasi” <http://www.bi.go.id/>, diakses pada 03 Nov. 2018, pukul 13.01 WIB.

IHPB menunjukkan tingkat harga yang diterima produsen pada berbagai tingkat produksi.

c. Indeks Harga Implisit (*GDP Deflator*)

Walaupun sangat bermanfaat, IHK dan IHPB memberikan gambaran laju inflasi yang sangat terbatas. Sebab, dilihat dari metode perhitungannya, kedua indikator tersebut hanya melingkupi beberapa puluh atau mungkin ratus barang jenis jasa, di beberapa puluh kota saja. Padahal dalam kenyataan, jenis barang dan jasa yang diproduksi atau dikonsumsi dalam sebuah perekonomian dapat mencapai ribuan, puluhan ribu bahkan mungkin ratusan ribu jenis. Kegiatan ekonomi juga terjadi tidak hanya di beberapa kota saja, menaiki seluruh pelosok wilayah. Untuk mendapatkan gambaran inflasi yang paling mewakili keadaan sebenarnya, ekonom menggunakan Indeks Harga Implisit (*GDP Deplator*), disingkat IHI.

## 6. Dampak Inflasi

Pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang yang diproduksi dalam masyarakat meningkat. Tingkat inflasi yang tinggi akan berdampak buruk pada pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi yang tinggi akan menurunkan pertumbuhan ekonomi.<sup>13</sup> Kenaikan harga-harga yang tinggi dan terus-menerus bukan saja menimbulkan beberapa efek buruk ke atas kegiatan ekonomi, tetapi juga kepada kemakmuran individu dan masyarakat.

a. Inflasi dan perkembangan ekonomi.

---

<sup>13</sup> Herman Ardiansya, *Pengaruh Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia*, (Jurnal Pendidikan Ekonomi, <http://jurnal.mahasiswa.unesa.ac.id>).

Inflasi yang tinggi tingkatnya tidak akan menggalakan perkembangan ekonomi. Biaya yang terus-menerus naik menyebabkan kegiatan produktif sangat tidak menguntungkan. Maka pemilik modal biasanya lebih suka menggunakan uangnya untuk tujuan spekulasi.

b. Inflasi dan kemakmuran masyarakat.

Di samping menimbulkan efek buruk ke atas kegiatan ekonomi negara, inflasi juga akan menimbulkan efek-efek yang berikut kepada individu dan masyarakat:

- 1) Inflasi akan menurunkan pendapatan riil orang-orang yang berpendapatan tetap.
- 2) Inflasi akan mengurangi nilai kekayaan yang berbentuk uang.
- 3) Memperburuk pembagian kekayaan.<sup>14</sup>

Menurut Samuelson dan Nordaus, dampak inflasi terhadap perekonomian terjadi dalam beberapa hal:

- 1) Redistribusi pendapatan dan kekayaan.

Salah satunya adalah redistribusi dari kreditur ke debitur.

- 2) Distorsi harga.

Pada inflasi rendah membuat pembeli dan penjual menyadari inflasi tersebut dan bisa membedakan inflasi antara barang yang bersubstitusi (misalnya daging dan telur).

- 3) Distorsi penggunaan uang.

Setiap orang mengubah cara menggunakan uang. Karena inflasi berarti menurunkan nilai riil uang, orang cenderung meminimalisasi jumlah uang yang dipegang.

---

<sup>14</sup> Sadono Sukirno, *Makro Ekonomi Teori Pengantar*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada 2013), 338-339.



4) Distorsi pajak.

Semakin tinggi inflasi, semakin tinggi beban pajak secara riil.<sup>15</sup>

## 7. Cara Mengatasi Inflasi

Setiap pokok permasalahan itu mempunyai pemecahan atau penyelesaiannya sendiri, begitu juga dengan terjadinya inflasi di berbagai negara begitupun dinegara Indonesia. Inflasi dapat diatasi dengan melaukan pengurangan jumlah uang beredar, memperbanyak jumlah uang dan jasa serta menetapkan harga maksimum (agar harga tidak terus naik).

a. Kebijakan moneter yang bersifat mengurangi jumlah uang beredar.

Hal ini adalah salah satu untuk mengatasi inflasi tentu digunakan kebijakan moneter yang bersifat mengurangi jumlah uang yang beredar yang meliputi:

1) Kebijakan pasar terbuka

Kebijakan bank sentral untuk mengurangi uang beredar dengan cara menjual SBI (Surat Bank Indonesia).

2) Kebijakan diskonto

Kebijakan bank sentral untuk mengurangi uang beredar dengan cara menaikkan suku bunganya.

3) Kebijakan cadangan khas

Kebijakan bank sentral untuk mengurangi uang beredar dengan cara menaikkan cadangan khas minimum.

4) Kebijakan kredit selektif

---

<sup>15</sup> Zaini Ibrahim, *Pengantar Ekonomi Makro*, (Banten, Baraka Aksara 2013), 93-94.

Kebijakan bank sentral untuk mengurangi uang beredar dengan cara memperketat syarat-syarat pemberian kredit.

5) Sanering

Kebijakan Bank Sentral memotong nilai mata uang dalam negeri jika mata uang sudah mengalami hiper inflasi (inflasi di atas 100%).

6) Menarik atau memusnahkan uang lama

Kebijakan bank sentral untuk mengurangi uang beredar dengan cara menarik atau memusnahkan uang lama seperti uang logam.

7) Membatasi pencetakan uang baru

Untuk mengatasi inflasi pemerintah harus membatasi pencetakan uang baru agar jumlah uang beredar tidak semakin bertambah.<sup>16</sup>

8) Rasio Cadangan Wajib

Rasio Cadangan Wajib yang lazim diterapkan bagi bank umum adalah berupa Giro Wajib Minimum (GWM).

9) Intervensi Di Pasar Uang

Yaitu kewajiban yang ditempuh bank sentral untuk mempengaruhi JUB atau Likuiditas di pasar uang (Ms) melalui jual beli valas atau cadangan devisa.

10)Himbauan Moral

Bank sentral dapat juga melakukan himbauan moral. Himbauan ini sangat kualitatif sifatnya dan tidak menuntut bank komersial untuk menaatinya.<sup>17</sup>

b. Kebijakan fiskal

---

<sup>16</sup> Cara Mengatasi Inflasi Dengan Kebijakan Moneter dan Fiskal Lengkap, <https://www.dosenpendidikan.com>. Diakses pada 27/11/2018.

<sup>17</sup> Zaini Ibrahim, *Pengantar Ekonomi Makro...*,157.

Kebijakan fiskal adalah langkah untuk memengaruhi penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan itu dapat memengaruhi tingkat inflasi. Kebijakan fiskal antara lain sebagai berikut.

1) Menghemat Pengeluaran Pemerintah

Pemerintah dapat menekan inflasi dengan cara mengurangi pengeluaran, sehingga permintaan akan barang dan jasa berkurang yang pada akhirnya dapat menurunkan harga.

2) Menaikkan Tarif Pajak

Untuk menekan inflasi, pemerintah dapat menaikkan tarif pajak. Naiknya tarif pajak untuk rumah tangga dan perusahaan akan mengurangi tingkat konsumsi. Pengurangan tingkat konsumsi dapat mengurangi permintaan barang dan jasa, sehingga harga dapat turun.<sup>18</sup>

## **B. Suku Bunga**

### **1. Pengertian Suku Bunga**

Tingkat Bunga adalah kompensasi yang harus dibayarkan oleh peminjam dana kepada yang memberikan pinjaman, dari sudut peminjaman merupakan biaya dan dana yang mereka pinjam. Tingkat Bunga yang sesungguhnya adalah suatu tingkat yang menciptakan keseimbangan antara penawaran tabungan dan permintaan investasi dana-dana dalam situasi yang sempurna.<sup>19</sup>

Bunga bank dapat diartikan sebagai balas jasa yang diberikan oleh bank yang berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual

---

<sup>18</sup> 3 Cara Untuk Mengatasi Inflasi Dengan Kebijakan Yang Tepat, <https://www.jurnal.id>. Diakses pada 27/11/2018.

<sup>19</sup> Mukhlisotul Jannah, *Manajemen Keuangan*, (Serang, UIN Banten), 17.

produknya. Bunga bank dapat diartikan sebagai harga yang harus dibayar kepada nasabah (yang memiliki simpanan) dengan yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank (nasabah yang memperoleh pinjaman).<sup>20</sup>

Bunga kredit bank adalah suku bunga uang yang diterima oleh bank (pemberi pinjaman atau kreditur) dari penerima pinjaman atau kreditur. Secara umum, besarnya suku bunga kredit ditentukan oleh pasar yaitu kekuatan antara pemberi dan penerima kredit.<sup>21</sup>

## 2. Dasar Hukum Suku Bunga

### a. Dasar Hukum Inflasi Berdasarkan Al-Quran

وَمَا آتَيْتُم مِّنَ الرَّبِّ لَيْرْبُوبٍ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوبُ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

Artinya: Dan sesuatu tambahan (riba) yang engkau berikan agar ia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah yang melipat gandakan (pahalanya). ( QS Arrum: 39)<sup>22</sup>

### b. Dasar Hukum Inflasi Berdasarkan Hadist

عَنْ جَابِرٍ قَالَ : لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَ أَكَلَ الرَّبَا، وَمَوْ كِلَهُ، وَكَآ تَيْبَهُ، وَشَا هِدْيَهُ وَقَالَ ( هُمْ سَوَاءٌ ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

Artinya: Dari Jabir, ia berkata : Rasulullah saw. Telah la'nati orang yang makan riba dan yang memberi makannya dan penulisnya dan dua saksinya, dan ia bersabda : “Mereka itu sama”. Diriwayatkan Oleh Muslim.<sup>23</sup>

---

<sup>20</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta, pt. RAJA GRAFINDO PERSADA 2013), 114.

<sup>21</sup> Iwayan Sudirman, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta, KENCANA PRENADA MEDIA GRUP 2013), 173.

<sup>22</sup> M. Quraish Shihab, *Al-Qur'an dan Maknanya*,, 408.

<sup>23</sup> A. Hassan, *Bulughul Maram*, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro), 365.

### **3. Fungsi Suku Bunga**

Dua masalah pokok yang harus dipecahkan oleh setiap sistem ekonomi adalah, pertama, berapa banyak faktor produksi yang harus digunakan/dialokasikan untuk menghasilkan beberapa barang yang berbeda pada waktu yang bersamaan. Kedua, adalah masalah alokasi penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan barang yang akan digunakan sekarang atau di kemudian hari.<sup>24</sup>

### **4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Suku Bunga**

Untuk menentukan besar kecilnya suku bunga simpanan dan pinjaman sangat dipengaruhi oleh keduanya, artinya baik bunga simpanan maupun bunga pinjaman saling mempengaruhi di samping pengaruh faktor-faktor lainnya.

#### **a. Kebutuhan dana**

Apabila bank kekurangan dana, sementara permohonan jaminan meningkat, maka yang dilakukan oleh bank agar dana tersebut cepat terpenuhi dengan meningkatkan suku bunga simpanan.

#### **b. Persaingan**

Dalam memperebutkan dana simpanan, maka di samping faktor promosi, yang paling utama pihak perbankan harus memerhatikan pesaing.

#### **c. Kebijakan pemerintah**

Dalam arti baik untuk bunga simpanan maupun pinjaman kita tidak boleh melebihi bunga yang sudah ditetapkan pemerintah.

#### **d. Target laba yang diinginkan**

Sesuai dengan target laba yang diinginkan, jika laba yang diinginkan besar, maka bunga pinjaman ikut besar dan sebaliknya.

---

<sup>24</sup> Nopirin, *Ekonomi Moneter...*, 176.

e. Jangka waktu

Semakin panjang jangka waktu pinjaman, akan semakin akan semakin tinggi bunganya, hal ini disebabkan besarnya kemungkinan risiko di masa mendatang.

f. Kualitas jaminan

Semakin likuid jaminan yang diberikan, semakin rendah bunga kredit yang dibebankan dan sebaliknya

g. Reputasi perusahaan

Bonafiditas suatu perusahaan yang akan memperoleh kredit sangat menentukan tingkat suku bunga yang akan dibebankan nantinya.

h. Produk yang kompetitif

Maksudnya adalah produk yang dibiayai tersebut laku dipasaran.

i. Hubungan baik

Biasanya bank menggolongkan nasabahnya antara nasabah utama (primer) dan nasabah biasa (sekunder).

j. Jaminan pihak ketiga

Pihak yang memberikan jaminan kepada penerima kredit. Biasanya jika pihak yang memberikan jaminan bonafid, baik dari segi kemampuan membayar maupun loyalitas terhadap bank.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya...* 115-117.

## 5. BI Rate dan BI 7-day (Reverse) Repo Rate

### a) BI Rate

Suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap atau *stance* kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan diumumkan kepada publik.<sup>26</sup>

### b) BI 7-day (Reverse) Repo Rate

Bank Indonesia melakukan penguatan kerangka operasi moneter dengan mengimplementasikan suku bunga acuan atau suku bunga kebijakan baru yaitu BI 7-Day (Reverse) Repo Rate, yang berlaku efektif sejak 19 Agustus 2016, menggantikan BI Rate. Penguatan kerangka operasi moneter ini merupakan hal yang lazim dilakukan di berbagai bank sentral dan merupakan best practice internasional dalam pelaksanaan operasi moneter. Kerangka operasi moneter senantiasa disempurnakan untuk memperkuat efektivitas kebijakan dalam mencapai sasaran inflasi yang ditetapkan. Instrumen BI 7-day (Reverse) Repo Rate digunakan sebagai suku bunga kebijakan baru karena dapat secara cepat memengaruhi pasar uang, perbankan dan sektor riil. Instrumen BI 7-Day Repo Rate sebagai acuan yang baru memiliki hubungan yang lebih kuat ke suku bunga pasar uang, sifatnya transaksional atau diperdagangkan di pasar, dan mendorong pendalaman pasar keuangan, khususnya penggunaan instrumen repo. Dengan penggunaan instrumen BI 7-day (Reverse) Repo Rate sebagai suku bunga kebijakan baru, terdapat tiga dampak utama yang diharapkan. Pertama, menguatnya sinyal kebijakan moneter dengan suku bunga (Reverse) Repo Rate 7

---

<sup>26</sup> Frida Dwi Rustika, *Pengaruh Inflasi, Suku Bunga Acuan (BI Rate), Nilai Tukar dan GDP terhadap Non Performing Financing Perbankan Syariah*, (Skripsi pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta, 2016), 6.

hari sebagai acuan utama di pasar keuangan. Kedua, meningkatnya efektivitas transmisi kebijakan moneter melalui pengaruhnya pada pergerakan suku bunga pasar uang dan suku bunga perbankan. Ketiga, terbentuknya pasar keuangan yang lebih dalam, khususnya transaksi dan pembentukan struktur suku bunga di pasar uang antarbank (PUAB) untuk tenor 3-12 bulan.<sup>27</sup>

## C. Kredit Bermasalah

### 1. Pengertian Kredit Bermasalah

Pengertian kredit bermasalah atau kredit macet adalah suatu kondisi pembiayaan yang ada penyimpangan (deviasi) atas terms of lending yang disepakati dalam pembayaran kembali pembiayaan itu sehingga terjadi keterlambatan, diperlukan tindakan yuridis, atau diduga ada kemungkinan potensi loss. Dalam portofolio pembiayaan, pembiayaan bermasalah masih merupakan pengelolaan pokok, karena resiko dan faktor kerugian terhadap risk asset tersebut akan memengaruhi kesehatan.<sup>28</sup>

### 2. Dasar Hukum Kredit Macet

#### a. Dasar Hukum Menurut Al-Quran

مَنْ ذَا الَّذِي يُعْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Artinya: Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak. (Al-Hadid: 11).<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> “BI 7-day (Reverse) Repo Rate” <http://www.bi.go.id/>, diakses pada 03 Nov. 2018, pukul 13.01 WIB.

<sup>28</sup> S. Hendrianita, *Pengaruh Modal Usaha Anggota, Karakter Anggota dan Kemampuan Usaha Anggota terhadap Kredit Macet Produk Pembiayaan Murabahah Pada Tahun 2015 di BMT Sinar Amanah Boyolangu Tukungagung*, ( Skripsi : IAIN Tulungagung

<sup>29</sup> M. Quraish Shihab, *Al-Qur'an dan Maknanya*,, 538.



## b. Dasar Hukum Menurut Hadist

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى ص قَالَ : ( مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ آدَاءَهَا آدَى اللَّهِ عَنْهُ، وَمَنْ أَخَذَهَا يُرِيدُ إِتْلَافَهَا أَتْلَفَهُ اللَّهُ تَعَالَى ) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

Dari Abu Hurairah, dari Nabi saw.. Ia bersabda : “Barang siapa menerima harta orang dengan maksud menunaikannya niscaya Allah tunaikan buat dia dan barang siapa yang mengambilnya dengan maksud merusaknya niscaya Allah rusak dia”.

Diriwayatkan-dia oleh Bukhari.<sup>30</sup>

## 3. Penyebab Kredit Macet

. penyebab kredit macet telah banyak diidentifikasi, dalam praktek tidak mudah mencari jalan keluarnya. Memang Bank Indonesia telah melakukan beberapa langkah strategis untuk mengatasi kredit bermasalah, yaitu: (1) membantu perbankan dalam penyelesaian kredit bermasalah, (2) meningkatkan pembinaan bank bermasalah, (3) mencegah terjadinya kredit bermasalah dimasa mendatang.

Kredit bermasalah merupakan kondisi yang sangat ditakuti oleh setiap pegawai bank. Karena dengan adanya kredit bermasalah tersebut akan menyebabkan menurunnya kinerja usaha bank, yang selanjutnya memungkinkan terjadinya penurunan laba.

Deteksi dini atas kredit bermasalah dapat dilakukan secara sistematis dengan mengembangkan sistem “pengenalan dini” yang berupa suatu daftar kejadian atau gejala yang diperkirakan dapat menyebabkan suatu pinjaman berkembang menjadi kredit bermasalah. Daftar tersebut dapat disusun mulai dari sisi nasabah, sisi ekstern nasabah, dan sisi bank, yaitu:

### a. Sisi Nasabah

---

<sup>30</sup> A. Hassan, *Bulugul Maram* ,, 379.

## 1) Faktor Keuangan

Faktor-faktor keuangan yang dapat diidentifikasi sebagai penyebab kredit bermasalah, antara lain:

- a) Utang meningkat sangat tajam.
- b) Utang meningkat tidak seimbang dengan peningkatan asset.
- c) Pendapatan bersih menurun.
- d) Penurunan penjualan.
- e) Biaya penjualan, biaya umum dan administrasi meningkat.
- f) Perubahan kebijaksanaan dan syarat-syarat penjualan secara kredit.
- g) Rata-rata umur piutang bertambah lama sehingga perputaran piutang semakin lambat.
- h) Piutang tak tertagih meningkat.
- i) Perputaran persediaan semakin lambat.
- j) Keterlambatan memperoleh neraca teratur.
- k) Tagihan yang terkonsentrasi pada pihak tertentu.
- l) Dan sebagainya.

## 2) Faktor Manajemen

Faktor-faktor manajemen yang dapat diidentifikasi sebagai penyebab kredit bermasalah, antara lain:

- a) Perubahan dalam manajemen dan kepemilikan perusahaan.
- b) Tidak ada kaderisasi dan job discription yang jelas.
- c) Sakit atau meninggalnya orang penting dalam perusahaan (key person).
- d) Kegagalan dalam perencanaan.

- e) Manajemen puncak didominasi oleh orang yang kurang cakap.
- f) Pelanggaran terhadap perjanjian atau kalusual kredit.
- g) Penyalahgunaan kredit.
- h) Pendapatan naik dengan kualitas menurun.
- i) Rendahnya semangat dalam mengelola perusahaan.
- j) Dan sebagainya.

### 3) Faktor Operasional

Faktor-faktor operasional yang dapat diidentifikasi sebagai penyebab kredit bermasalah, antara lain:

- a) Hubungan nasabah dengan mitra usahanya makin menurun.
- b) Kehilangan satu atau lebih pelanggan utama.
- c) Pembinaan sumber daya manusia yang tidak baik.
- d) Tertundanya penggantian mesin dan peralatan yang sudah ketinggalan atau tidak efisien.
- e) Operasional perusahaan mencemari lingkungan.
- f) Dan sebagainya.

### b. Sisi Ekstern

Faktor-faktor ekstern yang dapat diidentifikasi sebagai penyebab kredit bermasalah, antara lain:

1. Perubahan kebijaksanaan pemerintah di sektor riil.
2. Peraturan yang bersifat membatasi dan berdampak besar atas situasi keuangan dan operasional serta manajemen nasabah.

3. Kenaikan harga faktor-faktor produksi tinggi (BBM, angkutan, dan sebagainya).
4. Perubahan teknologi yang sangat cepat dalam industri yang diterjuni oleh nasabah.
5. Meningkatnya suku bunga pinjaman.
6. Resesi, devaluasi, inflasi, deflasi dan kebijakanmoneter lainnya.
7. Peningkatan persaingan dalam bidang usaha.
8. Bencana alam (force majeure).
9. Dan sebagainya.

c. Sisi Bank

Faktor-faktor yang dapat diidentifikasi sebagai penyebab kredit bermasalah, antara lain:

1. Buruknya perencanaan financial atas aktiva tetap/modal kerja.
2. Adanya perubahan waktu dalam permintaan kredit musiman.
3. Menerbitkan cek kosong.
4. Gagal memenuhi syarat-syarat dalam perjanjian kredit.
5. Adanya over kredit atau underfinancing.
6. Manipulasi data.
7. Over taksasi agunan atau penilaian agunan terlalu tinggi.
8. Kredit topeng, tempilan atau fiktif.
9. Kelemahan analisis oleh pejabat kredit sejak awal proses pemberian kredit.
10. Dan sebagainya.

#### **4. Cara Mengatasi Kredit Bermasalah**

Bank umum sangat berkepentingan dengan langkah pengamanan untuk mengurangi jumlah nilai kredit bermasalah. Karena biaya yang memiliki konsekuensi biaya uang besar, kalau hal itu terjadi pada struktur keuangan mereka. Berikut langkah yang dilakukan untuk menyelamatkan kreditor dan memulihkan kesehatan keuangan.<sup>31</sup>

- a. Pemberian Saran
- b. Penambahan Modal
- c. Merger
- d. Pengurangan Rencana Perluasan
- e. Mendorong Penagihan Piutang yang Lamban
- f. Meningkatkan Pengendalian Persediaan
- g. Dapatkan Jaminan Tambahan
- h. Memperoleh Jaminan
- i. Restrukturisasi Utang
- j. Menambah Jumlah Kredit

#### **D. Bank Umum Syariah**

##### **1. Pengertian Bank Umum Syariah**

Menurut Undang-undang No.21 tahun 2008, Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Munculnya dua kelembagaan ini pada

---

<sup>31</sup> Nur Rianto Al Arif, *Pengantar Ekonomi Syariah Teori dan Statistik*, (Bandung: Cv Pustaka Setia 2015), 167-168.

perbankan syariah di Indonesia berkaitan dengan *dual system* yang dianut pada sistem perbankan di Indonesia.<sup>32</sup>

Secara umum bank syariah dapat didefinisikan sebagai bank dengan pola bagi hasil yang merupakan landasan utama dalam segala operasinya, baik dalam produk pendanaan, pembiayaan, maupun dalam produk lainnya. Produk-produk bank syariah mempunyai kemiripan tetapi tidak sama dengan produk bank konvensional karena adanya pelanggaran *riba*, *gharar* dan *maysir*. Oleh karena itu, produk-produk pendanaan dan pembiayaan pada bank syariah harus menghindari unsur-unsur yang dilarang tersebut.<sup>33</sup>

## 2. Konsep Dasar

Bank Islam atau di Indonesia disebut bank syariah merupakan lembaga keuangan yang berfungsi memperlancar mekanisme ekonomi di sektor riil melalui aktivitas kegiatan usaha (investasi, jual beli, atau lainnya) berdasarkan prinsip syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembayaran kegiatan usaha. Selain itu, dimensi keberhasilan bank syariah meliputi keberhasilan dunia dan akhirat (*long term oriented*) yang sangat memperhatikan kebersihan sumber, kebenaran proses dan kemanfaatan hasil.<sup>34</sup>

## 3. Kegiatan Usaha Bank Syariah

Bank Syariah yang terdiri dari BUS, UUS serta BPRS, pada dasarnya melakukan kegiatan usaha yang sama dengan bank konvensional, yaitu menghimpun dana dan menyalurkan ke masyarakat di samping penyediaan jasa keuangan lainnya. Perbedaannya

---

<sup>32</sup> Nur Rianto Al Arif, *Pengantar Ekonomi Syariah Teori dan Statistik...*, 318.

<sup>33</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada 2011), 2.

<sup>34</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah...*, 30.

adalah seluruh kegiatan usaha bank syariah, UUS dan BPRS didasarkan pada prinsip syariah. Implikasinya, di samping harus selalu sesuai dengan prinsip hukum Islam juga adalah karena dalam prinsip syariah memiliki berbagai varian produk yang lebih banyak di bandingkan produk bank konvensional.

## **E. *Non Performing Financing* (NPF)**

### **1. Pengertian *Non Performing Financing* (NPF)**

Dalam berbagai peraturan yang diterbitkan Bank Indonesia tidak dijumpai pengertian dari "pembiayaan bermasalah". Begitu juga istilah *Non Performing Financing* (NPFs) untuk fasilitas pembiayaan ataupun istilah *Non Performing Financing* (NPFs) untuk fasilitas kredit tidak dijumpai dalam peraturan-peraturan yang diterbitkan Bank Indonesia. Namun dalam setiap statistik Perbankan Syariah yang diterbitkan oleh Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia dapat dijumpai istilah *Non Performing Financing* (NPFs) yang diartikan sebagai "pembiayaan *Non* lancar dari kurang lancar sampai dengan macet".<sup>35</sup>

Kredit Macet/NPL (termasuk NPF, *pen*) pada mulanya selalu diawali dengan terjadinya "wanprestasi" (ingkar janji/cedera janji), yaitu suatu keadaan di mana debitur tidak mau dan tidak mampu memenuhi janji-janji yang telah dibuatnya sebagaimana tertera dalam perjanjian kredit (termasuk perjanjian pembiayaan, *pen*). Penyebab debitur wanprestasi dapat bersifat alamiah (di luar kemampuan dan kemauan debitur), maupun

---

<sup>35</sup> Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta, Sinar Grafika 2014), 66.

akibat iktikad tidak baik debitur. Wanprestasi juga disebabkan oleh pihak bank karena membuat syarat perjanjian kredit yang sangat memberatkan pihak debitur.<sup>36</sup>

## F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan sebagai bahan referensi yang dapat memberikan gambaran bagi peneliti terkait kondisi objek yang diteliti berdasarkan hasil penelitian sebelumnya dan menjadi acuan dalam menyusun kerangka berpikir sehingga membawa peneliti pada pengolahan data penelitian secara baik dan benar.

Dengan melalui penelitian terdahulu yang akan digunakan sebagai bahan perbandingan antara penelitian yang akan diteliti dengan penelitian yang sudah diteliti, hal ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat persamaan dan perbedaan dalam penelitian. Adapun hasil dari penelitian terdahulu yang diperoleh yaitu sebagai berikut:

1	Frida Dwi Rustika, dalam penelitiannya yang berjudul. Pengaruh Inflasi, Suku Bunga Acuan (BI Rate), Nilai Tukar dan GDP terhadap Non	Adapun perbedaan dalam penelitian ini adalah Penelitiannya bertujuan untuk mengetahui pengaruh inflasi, suku bunga acuan (BI Rate), Nilai Tukar dan GDP terhadap Non Performing	Hasil dari ini menunjukkan bahwa Variabel Inflasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap <i>Non Performing Financing</i> dengan koefisiensi regresi sebesar -0,361 dan signifikansi 0,267. Bi Rate
---	--	---	--

<sup>36</sup> Khotibul Umam, Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, (Jakarta, PTp. Raja Grafindo Persada 2016), 206.



	<i>Performing Financing</i> Perbankan Syariah.	Financing Perbankan Syariah.	masuk dalam <i>exclude variables</i> . <sup>37</sup>
2	Syahrimumdin Pane, Pengaruh Inflasi dan Kurs terhadap Non <i>Performing Financing</i> (Studi Kasus pada Bank Syariah).	Persamaan dalam penelitian ini yaitu Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian adalah analisis regresi berganda. Adapun perbedaannya adalah Penelitiannya bertujuan untuk mengetahui pengaruh Inflasi dan Kurs terhadap Non <i>Performing Financing</i> (Studi Kasus pada Bank Syariah).	Hasil penelitian yang diperoleh bahwa inflasi berpengaruh terhadap pembiayaan bermasalah ( <i>Non Performing Financing</i> ) perbankan syariah setiap peningkatan inflasi di Indonesia akan mengakibatkan penurunan pembiayaan bermasalah ( <i>Non Performing Financing</i> ) <sup>38</sup>
3	Yulina Ester Manafe, Pengaruh Inflasi terhadap Non <i>Performing</i>	Persamaan pada penelitian ini adalah Menggunakan teknik analisis data uji asumsi klasik dan analisis	Hasil analisis yang telah dilakukan menunjukkan hasil nilai inflasi positif dan signifikan terhadap

<sup>37</sup> Frida Dwi Rustika, *Pengaruh Inflasi, Suku Bunga Acuan (BI Rate), Nilai Tukar dan GDP terhadap Non Performing Financing Perbankan Syariah*, (Skripsi pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta, 2016).

<sup>38</sup> Syahrimumdin Pane, *Pengaruh Inflasi dan Kurs terhadap Non Performing Financing pada Bank Syariah*, (Tesis Program Pascasarjana IAIN Sumatra Utara Medan, 2011).

	<p><i>Financing</i> (NPF) (Ktudi Kasus Pada PT. Bank Syariah Mandiri di Indonesia Periode 2011-2014),2017.</p>	<p>regresi. Adapun perbedaan Penelitian bertujuan untuk mengetahui pengaruh Inflasi terhadap <i>Non Performing Financing</i> (NPF) (Ktudi Kasus Pada PT. Bank Syariah Mandiri di Indonesia Periode 2011-2014),2017.</p>	<p><i>Non Performing Financing</i> (NPF). Terlihat dari uji T(parsial) yaitu (2,355&gt;1,734) dan kemudian nilai signifikan 0,030&lt;0,50.39</p>
4	<p>Umi Uswatun Hasanah, Pengaruh Inflasi, Suku Bunga dan Nilai Tukar terhadap Non Performing Financing studi kasus pada Bank Pembiayaan Rakyat di Indonesia Periode 2013-2015.</p>	<p>Persamaan dalam penelitian ini adalah Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik sampel jenuh, teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda. Perbedaannya adalah Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa variable inflasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Non Performing Financing dengan koefisien regresi sebesar 1,246 dengan signifikansi 0,222. Variable suku bunga berpengaruh secara</p>

<sup>39</sup> Yulina Ester Manafe, *Pengaruh Inflasi terhadap Non Performing Financing* (NPF), (Program Studi D3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah Palembang, 2017).

		Pengaruh Inflasi terhadap Non Performing Financing Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Syariah, Pengaruh Suku Bunga (BI Rare) terhadap Non Performing Financing Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Syariah, Pengaruh Nilai Tukar terhadap Non Performing Financing Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Syariah. Periode penelitian 2013-2015.	signifikan terhadap Non Performing Financing dengan koefisien sebesar 3,693 dengan signifikansi 0,001.
--	--	---	--

### G. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir merupakan pendapat-pendapat yang diuraikan dalam teori maupun konsep yang sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti yang kemudian membentuk bagan alur pemikiran. Dalam kerangka pemikiran menjelaskan bagaimana hubungan antar variabel yang mempengaruhi *Independent* terhadap variabel yang dipengaruhinya *Dependent*. Menurut Uma Sekaran dalam bukunya *Bussines research*, mengemukakan

kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.<sup>40</sup>

Inflasi merupakan masalah ekonomi yang memiliki dampak ke berbagai lini perekonomian, salah satunya yang berdampak pada lembaga keuangan bank. Inflasi diduga memberikan dampak pada kondisi kredit bermasalah Bank Umum Syariah. Kredit bermasalah bersifat kasuasitas, yang artinya masalah yang ada pada satu beditur akan berbeda dengan debitur lainnya. Kredit macet atau kredit bermasalah yang terjadi secara tiba-tiba tanpa dimulai serangkaian tanda-tanda atau sinyal adalah sangat langka. Bank dapat mendeteksi variabel-variabel dalam penetapan kolektibilitas yang didasarkan pada kriteria tunggakan utang pokok dan bunga dan cerukan (*overdraft*), indikator lainnya. Suatu kredit dikatakan bermasalah bila memenuhi kriteria kolektibilitas 2 sampai dengan 4.<sup>41</sup>

Inflasi didefinisikan sebagai kenaikan harga-harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus. Inflasi berkaitan dengan harga barang dan jasa secara umum. Artinya, kenaikan harga satu jenis barang tidak termasuk dalam kategori inflasi.<sup>42</sup> Pada saat inflasi naik maka secara langsung pendapatan masyarakat secara umum akan menurun karena beban harga barang atau jasa cenderung meningkat sehingga bagi masyarakat yang memiliki angusran kredit pada lembaga keuangan akan terganggu.

Menurut Latumaerissa definisi singkat dari inflasi adalah kecendrungan dari harga-harga untuk menaik secara terus menerus. Kenaikan dari satu atau dua jenis saja tidak menyeret harga barang lain tidak bisa disebut inflasi. Kenaikan harga-harga musiman, misalnya menjelang lebaran hanya sekali saja, serta tidak memiliki pengaruh lanjutan, tidak bisa

---

<sup>40</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung, Alfabeta 2016), 60.

<sup>41</sup> Dr. Taswan, *Manajemen Perbankan Konsep, Teknik dan Aplikasi* (Yogyakarta, UPP STIM YKPN, 2010), 453.

<sup>42</sup> Zaini Ibrahim, *Pengantar Ekonomi Makro*, (Banten: Baraka Akasara, 2013), 89.

disebut inflasi. Kenaikan harga semacam ini tidak dianggap sebagai penyakit ekonomi yang memerlukan penanganan khusus untuk menanggulangnya.<sup>43</sup>

Menurut Ellen, pada saat inflasi sedang tinggi, maka Bank Indonesia akan menaikkan suku bunga. Karena kenaikan bunga tersebut, maka diharapkan masyarakat tertarik untuk menaruh uangnya ke bank dalam bentuk deposito atau tabungan, dibandingkan membelanjakan uangnya untuk konsumsi. Dengan begitu maka dapat menekan inflasi yang sedang terjadi.<sup>44</sup> Namun pada sisi yang lain kenaikan suku bunga BI atau *BI Rate* akan berdampak pada penyesuaian tingkat bunga kredit yang turut naik. Lazimnya, BI menaikkan suku bunga acuan apabila inflasi ke depan diperkirakan melampaui sasaran. Sebaliknya, BI memotong suku bunga itu apabila inflasi ke depan diperkirakan berada di bawah sasaran. Intinya, inflasi sasaran menjadi jangkar bagi penentuan suku bunga acuan.<sup>45</sup>

Kebijakan *BI Rate* diduga memberikan pengaruh terhadap NPF. Bank Indonesia menjelaskan definisi *BI Rate* yang merupakan suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap atau *stance* kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan diumumkan kepada publik. Pergerakan suku bunga acuan ini umumnya diikuti oleh peningkatan suku bunga deposito dan pada gilirannya suku bunga kredit perbankan ikut meninggi.<sup>46</sup>

Berdasarkan uraian diatas, peneliti dapat mengidentifikasi bahwa inflasi dan suku bunga diduga dapat menjadi faktor yang mempengaruhi kondisi NPF Bank Umum Syariah di Indonesia. Kemudian peneliti dapat menggambarkan kerangka pemikiran sebagai berikut:

---

<sup>43</sup> Julius R. Latumaerissa, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain* (Jakarta:Salemba Empat,2013), 22.

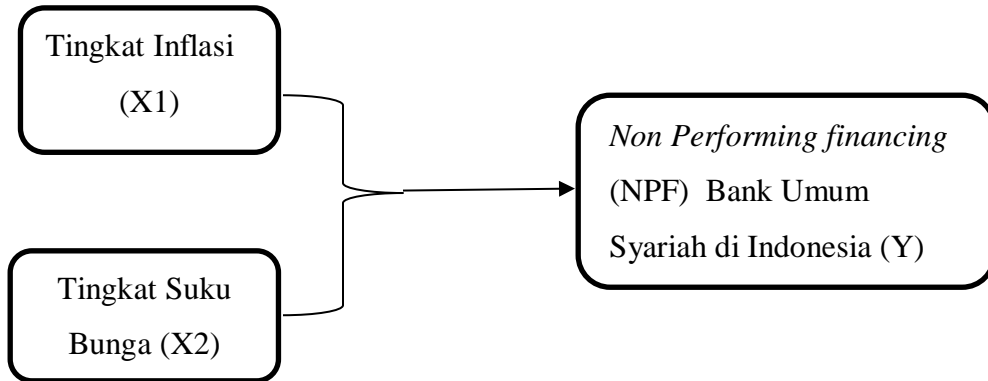
<sup>44</sup> Perubahan Suku Bunga Acuan, <http://www.ellen-may.com/>, diakses pada 19 Nov. 2018, pukul 13.47 WIB.

<sup>45</sup> Suku Bunga BI dan Inflasi, <https://www.kolom.tempo.com/>, diakses pada 19 Nov. 2018, pukul 14.19 WIB

<sup>46</sup> Frida Dwi Rustika, *Pengaruh Inflasi, Suku Bunga Acuan (BI Rate), Nilai Tukar dan GDP terhadap Non Performing Financing Perbankan Syariah*, (Skripsi pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta,2016), 6.

**Gambar 1.1**

**Kerangka Pemikiran**



Dari gambar diatas dapat diketahui bahwa peneliti akan melakukan penelitian terkait pengaruh Inflasi dan BI Rate terhadap *Non Performing Financing* NPF Bank Umum Syariah di Indonesia.

**H. Hubungan Antar Variabel**

**1. Hubungan antara Inflasi dengan NPF Bank Umum Syariah di Indonesia**

Inflasi didefinisikan sebagai kenaikan harga barang atau jasa secara umum dan terus-menerus yang kemudian secara langsung berdampak pada permasalahan finansial masyarakat. Kemudian timbul asumsi bahwa masyarakat dari kalangan nasabah pembiayaan bank syariah yang terdampak masalah keuangan akan mengalami keterlambatan atau kegagalan dalam kewajiban mengangsur pembiayaan/kredit. Pada kondisi tersebut peneliti dapat menyebutkan bahwa hal tersebut merupakan penyebab kredit masalah dari sisi ekstern yaitu inflasi dan sisi nasabah ditinjau dari faktor keuangan.

## 2. Hubungan antara BI Rate dengan NPF Bank Umum Syariah di Indonesia

Dari sisi skema pembiayaan, bank syariah tidak berdasarkan bunga akan tetapi menerapkan skema perhitungan pokok + margin yang menjadi total hutang nasabah, tidak boleh bertambah dan tidak boleh dijanjikan pasti berkurang. Sedangkan skema bunga erat kaitannya dengan suku bunga acuan yang rentan dengan perubahan. Berdasarkan konsep tersebut peneliti dapat mengasumsikan bahwa *BI Rate* secara langsung diduga tidak mempengaruhi NPF Bank Umum Syariah.

Akan tetapi apabila dilihat sisi kepentingan jenis nasabah atau debitur asumsi diatas dapat berubah. Terdapat debitur pembiayaan konsumtif dan produktif, pada umumnya jenis konsumtif untuk pembiayaan mikro sedangkan jenis produktif untuk pembiayaan makro. Jika pada saat suku bunga acuan naik maka pihak debitur pembiayaan produktif mungkin akan tertarik untuk berinventasi ke sektor yang berbasis bunga dan menunda atau mengurangi kewajiban hutangnya terhadap bank.

### I. Hipotesis Penelitian

Adapun hipotesis penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu:

$H_0^1$  : Tingkat inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap *Non Performing Financing* (NPF) Bank Umum Syariah di Indonesia.

$H_a^1$  : Tingkat inflasi berpengaruh signifikan terhadap *Non Performing Financing* (NPF) Bank Umum Syariah di Indonesia.

$H_0^2$  : Tingkat suku bunga tidak berpengaruh signifikan terhadap *Non Performing Financing* (NPF) Bank Umum Syariah di Indonesia.

$H_a^2$  : Tingkat suku bunga berpengaruh signifikan terhadap *Non Performing Financing* (NPF) Bank Umum Syariah di Indonesia.

$H_0^3$  : Tingkat inflasi dan tingkat suku bunga tidak berpengaruh signifikan terhadap *Non Performing Financing* (NPF) Bank Umum Syariah di Indonesia.

$H_a^3$  : Tingkat inflasi dan tingkat suku bunga berpengaruh signifikan terhadap *Non Performing Financing* (NPF) Bank Umum Syariah di Indonesia.